

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teori	15
2.1.1. Teori Kriminogenik Organisasi (<i>Organizational Criminogenic Theory</i>)	15
2.1.2. Korupsi.....	17
2.1.1.1. Korupsi pada Pengadaan Publik	21
2.1.1.2. Korupsi pada Pengadaan Publik Dana Alokasi Khusus.....	31
2.1.3. Pemberantasan Korupsi Pengadaan Publik Dana Alokasi Khusus	33
2.2. Telaah Penelitian Sebelumnya	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	42
3.1.1. Pendekatan Kualitatif	42
3.1.2. Pendekatan Fenomenologi	44

3.2. Alasan Pemilihan Setting	46
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	48
3.5. Teknik Analisis	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola Korupsi Pengadaan Publik DAK	53
4.1.1. Pola Korupsi Pengadaan antara Rekanan dan Produsen	60
4.1.1.1. <i>Mark-Up</i> (Diskon dari Produsen untuk Rekanan)	60
4.1.1.2. Pemenang Pengadaan Belum Melunasi Pembayaran ke Produsen di saat Pemerintah Daerah Telah Membayar Lunas ke Rekanan	62
4.1.2. Pola Korupsi Pengadaan pada Internal Rekanan	63
4.1.3. Pola Korupsi Pengadaan Antar Rekanan	64
4.1.3.1. <i>Complementary Bidding</i>	65
4.1.3.2. Selisih Tipis Penawaran Antarpesaing Rekanan pada Pengadaan Publik	66
4.1.3.3. Rekanan Lain yang Bukan Pemenang Pengadaan yang Mengerjakan Proyek Pengadaan (<i>Bid Rotation</i>)	67
4.1.4. Pola Korupsi Pengadaan antara Rekanan dan Pemerintahan	69
4.1.4.1. Kesepakatan Calon Pemenang Pengadaan Publik	70
4.1.4.2. Rekanan Tidak Sesuai Ketentuan Namun Dimenangkan	72
4.1.4.3. Kesepakatan Spesifikasi Teknis Output Pengadaan Publik dan HPS	74
4.1.4.4. Koordinator ULP dan PPK Mengunjungi Calon Produsen bersama Rekanan Calon Pemenang Sebelum Pengadaan Publik	76
4.1.4.5. Bagian X Persentase dari Harga Proyek	79
4.1.4.6. Sanggahan Pesaing Rekanan yang Kalah pada Pengadaan Publik Hanya Ditanggapi Secara Normatif oleh Panitia Pengadaan Publik	81
4.1.4.7. Output Pengadaan Tidak Bisa Digunakan Karena Tidak Disertai Pelatihan Penggunaan Output Pengadaan Publik	83
4.1.4.8. Kuantitas dan Kualitas dari Output Pengadaan Publik Tidak Sesuai dengan Kontrak Kerja Pengadaan Publik	83
4.1.4.9. Tahap Evaluasi Teknis Pengadaan Publik Tidak Sesuai Ketentuan	85
4.1.4.10. Tahap Pemeriksaan Output Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan	87
4.1.4.11. Tahap Pendistribusian Output Pengadaan Langsung dari Rekanan Tanpa Pengawasan dari Pemerintah Daerah	89
4.1.4.12. Ketidaksesuaian Administrasi di Tahap Distribusi Output Pengadaan	90
4.1.4.13. Aliran Dana dari Rekanan kepada Para Pejabat Kabupaten X	91

4.3.4.4. Update dan Upgrade Sistem.....	146
4.3.4.5. Penambahan Anggaran Penanganan Kasus Korupsi.....	147
4.3.4.6. Peningkatan Gaji Pegawai Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum ...	148
4.3.4.7. Kerjasama Antarlembaga Negara (Dinas, APH, DPR/D, BPK, BPKP)	149
4.3.5. Faktor Penghambat Mekanisme Pemberantasan Korupsi Pengadaan Publik	149
4.3.5.1. Takut Melaporkan Pengaduan (Takut Menjadi Whistleblower).....	150
4.3.5.2. Kurang Berintegritas	150
4.3.5.3. Lemahnya Pengetahuan tentang Jobdesk dan Regulasi	151
4.3.5.4. Data Tidak Lengkap dan Dirahasiakan	152
4.3.5.5. Sulit Mencari Bukti Keterlibatan Dalang Korupsi Pengadaan.....	152
4.3.5.6. Rendahnya Kesejahteraan Pegawai Pemerintahan.....	153
4.3.5.7. Keberadaan Oknum atau Mafia dalam Korupsi Pengadaan Publik	153
4.3.6. Penyebab Korupsi Pengadaan Publik.....	156
4.3.6.1. Penyebab Korupsi Pengadaan Publik DAK dari Internal	159
4.3.6.2. Penyebab Korupsi Pengadaan Publik DAK dari Eksternal.....	167
4.3.7. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK	174
4.3.7.1. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK pada Pelaku Korupsi dan Keluarga	175
4.3.7.2. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK pada Pejabat Publik Nonpelaku Korupsi.....	182
4.3.7.3. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK pada Entitas Pemerintahan	183
4.3.7.4. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK pada Aparat Penegak Hukum	189
4.3.7.5. Dampak Korupsi Pengadaan Publik DAK pada Rekanan dan Produsen	190

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian	194
5.2. Implikasi Penelitian	196
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	197
5.4. Saran	197

DAFTAR PUSTAKA.....	199
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	203
----------------------	------------